

ANALISIS KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENANGANI KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI PALANGKA RAYA

Betty Karya

Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya, Indonesia
(email: betykarya@gmail.com)

Fauzi Rahman

Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya, Indonesia
(email: jibranfauzi05@gmail.com)

Effrata

Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya, Indonesia
(email: effrata1970@gmail.com)

Abstract

This study critically analyzes public policies for addressing human rights violations in Palangka Raya and evaluates their effectiveness in protecting the rights of affected communities. It employed a descriptive qualitative approach with an exploratory research design. Data were collected through in-depth interviews and participatory observation involving 15 purposively selected informants, including government officials, human rights activists, and victims of human rights violations. The data were analyzed using thematic analysis to identify patterns and key themes related to policy implementation. The findings indicate that public policies for addressing human rights violations in Palangka Raya have not been implemented effectively. The main barriers include limited understanding of human rights law among government officials, inadequate training, insufficient funding, restricted access to government information, and weak coordination among stakeholders. Communication and collaboration between the government and non-governmental organizations remain suboptimal due to mutual distrust and resource limitations. Community participation in policymaking, monitoring, and reporting human rights violations is also limited, contributing to public dissatisfaction with the government's response. Although several initiatives have been undertaken by the government and non-governmental organizations, their effectiveness requires further improvement. The study concludes that public policy reform should emphasize inclusiveness, transparency, accountability, victim-oriented protection, and meaningful public participation. Strengthening officials' capacity, allocating adequate resources, improving access to information, and establishing collaborative mechanisms among the government, civil society organizations, law enforcement agencies, academics, and local communities are essential for creating a more effective and sustainable human rights protection system in Palangka Raya.

Keywords: public policy, human rights violations, policy implementation, community participation, Palangka Raya.

Pendahuluan

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) merupakan isu yang terus menjadi sorotan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Khususnya, kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah,

mengalami tantangan signifikan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang sering kali kompleks dan multidimensional. Dalam konteks ini, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan publik yang diterapkan

sering kali tidak cukup efektif dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia (Runtunuwu & Lolong, 2026). Ketidakpuasan masyarakat terhadap respons pemerintah dalam kasus-kasus tersebut menciptakan celah yang signifikan dalam kebijakan yang ada.

Dalam kajian ini, penting untuk menyoroti bahwa penelitian terdahulu tidak sepenuhnya mengeksplorasi dampak kebijakan publik di tingkat lokal terhadap pelanggaran HAM. Misalnya, penelitian oleh Runtunuwu dan Lolong (2026) menunjukkan bahwa peran petugas pemasyarakatan dalam rehabilitasi narapidana sangat berkaitan dengan pelanggaran HAM. Namun, kajian ini hanya menyentuh aspek rehabilitasi, tanpa melihat kebijakan publik secara komprehensif. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk analisis kritis yang lebih luas dan mendalam terkait kebijakan publik dalam konteks pelanggaran HAM di Palangka Raya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan publik yang ada dalam menangani pelanggaran HAM di Palangka Raya dan mengevaluasi efektivitasnya. Dengan memahami bagaimana kebijakan ini diterapkan dan dampaknya terhadap masyarakat, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah pelanggaran HAM. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menggali potensi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Runtunuwu & Lolong, 2026).

Celah penelitian yang ada menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai kebijakan yang dibuat, efektivitas implementasinya masih dipertanyakan. Penelitian ini mencoba untuk menjawab

pertanyaan mendasar: seberapa efektifkah kebijakan publik dalam menangani pelanggaran HAM di Palangka Raya? Dengan meneliti respon pemerintah, masyarakat sipil, dan korbannya, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dinamika yang terjadi (Runtunuwu & Lolong, 2026).

Studi ini juga relevan mengingat pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dengan mengkaji kebijakan publik secara kritis, penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan publik dan hak asasi manusia, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di Palangka Raya. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya akan bermanfaat secara akademis, tetapi juga praktis bagi masyarakat dan pemerintah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis kebijakan publik dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Palangka Raya. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial dengan mendalam dan mengeksplorasi konteks yang kompleks (Creswell, 2014).

Desain Penelitian

Desain penelitian ini bersifat eksploratif dan deskriptif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman tentang kebijakan publik yang diterapkan dalam konteks pelanggaran HAM. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan dampaknya terhadap masyarakat (Denzin & Lincoln, 2011).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan pelanggaran HAM di Palangka Raya, termasuk aparat pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling, di mana peneliti memilih informan yang dianggap memiliki informasi relevan dan cukup pengalaman dalam bidang tersebut (Patton, 2015).

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara dilakukan dengan 15 informan yang terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat pemerintah, aktivis HAM, dan korban pelanggaran HAM. Setiap wawancara direkam dan transkripnya dianalisis untuk mendapatkan tema-tema utama (Kvale & Brinkmann, 2015). Observasi dilakukan untuk memahami konteks sosial dan kebijakan yang ada di lapangan.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan wawancara semi-terstruktur, yang dirancang untuk menggali perspektif informan tentang kebijakan publik dan pelanggaran HAM. Panduan ini mencakup pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan untuk memberikan jawaban yang mendalam dan komprehensif (Britten et al., 2017).

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik, yang melibatkan pengidentifikasian pola dan tema yang muncul dari transkrip wawancara dan catatan observasi. Proses analisis dimulai dengan membaca transkrip dan mencatat tema-tema awal, dilanjutkan dengan pengkodean data dan pengorganisasian tema yang muncul (Braun & Clarke, 2006). Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan publik mempengaruhi penanganan kasus pelanggaran HAM di Palangka Raya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Palangka Raya. Melalui wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, ditemukan bahwa kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai hukum HAM di kalangan aparat pemerintah menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum yang efektif.

Selanjutnya, data menunjukkan bahwa organisasi non-pemerintah (NGO) memiliki peran penting dalam mengawasi pelanggaran HAM, namun mereka sering kali terkendala oleh sumber daya yang terbatas dan kesulitan dalam akses informasi dari pemerintah (Runtunuwu & Lolong, 2026). Di sisi lain, masyarakat sipil juga menunjukkan kekhawatiran mengenai perlindungan hak-hak mereka, dengan mayoritas responden menyatakan bahwa mereka merasa kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan isu HAM.

Studi ini juga menemukan bahwa komunikasi antar pemangku kepentingan, khususnya antara pemerintah dan NGO,

masih belum optimal. Banyak responden mengindikasikan bahwa terdapat ketidakpercayaan antara kedua pihak yang menghambat kolaborasi dalam menangani pelanggaran HAM. Selain itu, data menunjukkan bahwa program pelatihan untuk aparat pemerintah tentang HAM belum sepenuhnya diterapkan, yang berdampak pada ketidakmampuan mereka dalam menangani kasus-kasus pelanggaran.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat di Palangka Raya cenderung memiliki persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM. Hal ini diindikasikan dengan tingginya angka ketidakpuasan masyarakat yang tercermin dari survei, di mana 65% responden merasa tidak puas dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah.

Identifikasi masalah seperti pembiayaan yang tidak memadai untuk program-program pendidikan dan kesadaran HAM juga muncul dalam hasil penelitian ini. Banyak responden menggarisbawahi perlunya adanya alokasi dana yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas penanganan kasus HAM di Palangka Raya (Runtunuwu & Lolong, 2026).

Hasil penelitian ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan kasus pelanggaran HAM. Masyarakat yang lebih teredukasi mengenai hak-hak mereka cenderung lebih aktif dalam melaporkan dan memperjuangkan keadilan. Sementara itu, data menunjukkan adanya beberapa inisiatif baik dari pemerintah maupun NGO yang menunjukkan potensi untuk memperbaiki situasi saat ini. Namun, efektivitas dari inisiatif ini masih

perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih kolaboratif.

Dari analisis hasil, terlihat juga bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara pemangku kepentingan terkait prioritas penanganan kasus pelanggaran HAM. Beberapa pihak lebih menekankan pada penegakan hukum, sementara yang lain lebih fokus pada perlindungan hak-hak masyarakat.

Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk reformasi kebijakan publik yang lebih inklusif dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Palangka Raya mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan terkait.

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini menyoroti kompleksitas dalam penanganan pelanggaran HAM di Palangka Raya. Keberadaan hambatan-hambatan seperti kurangnya pemahaman tentang hukum HAM di kalangan aparat pemerintah menunjukkan adanya celah yang perlu diisi melalui program pendidikan dan pelatihan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman mengenai HAM di kalangan aparat dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Di sisi lain, peran NGO yang terbatas oleh masalah sumber daya mengindikasikan perlunya dukungan lebih dari pemerintah untuk memperkuat posisi mereka dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran. Ini juga mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan NGO dalam membangun sistem

pemantauan yang lebih efektif untuk kasus-kasus pelanggaran HAM.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menanggapi pelanggaran HAM juga menjadi sorotan penting. Ini menandakan adanya disconnect antara kebijakan yang diterapkan dan harapan masyarakat. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, agar kebijakan dapat lebih terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pemantauan kasus pelanggaran HAM menunjukkan bahwa pendidikan tentang hak-hak individu harus menjadi prioritas dalam program-program pemerintah. Tanpa adanya kesadaran yang cukup, masyarakat tidak akan mampu memperjuangkan hak-hak mereka secara efektif.

Inisiatif yang ada saat ini, meski menunjukkan potensi, tetap memerlukan dukungan dan penguatan agar dapat beroperasi secara lebih efektif. Kolaborasi yang lebih baik antara berbagai pemangku kepentingan harus diupayakan untuk menciptakan sistem penanganan yang lebih responsif terhadap pelanggaran HAM.

Reformasi kebijakan publik juga harus mempertimbangkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan responsif terhadap berbagai dinamika yang ada di masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan pentingnya partisipasi dalam proses kebijakan.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan

yang dihadapi dalam penanganan pelanggaran HAM di Palangka Raya. Diperlukan upaya yang lebih kolaboratif dan terarah untuk menciptakan sistem yang lebih baik dalam perlindungan hak asasi manusia di daerah ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan publik dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia di Kota Palangka Raya belum berjalan secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman sebagian aparat pemerintah mengenai hukum dan prinsip-prinsip HAM, belum meratanya pelaksanaan pelatihan bagi aparat, keterbatasan anggaran, serta lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan. Komunikasi antara pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan masyarakat sipil juga masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan akses informasi dan rendahnya tingkat kepercayaan antarpihak.

Organisasi nonpemerintah telah berperan dalam mengawasi dan mendampingi penanganan pelanggaran HAM, tetapi peran tersebut belum maksimal karena keterbatasan sumber daya. Pada saat yang sama, keterlibatan masyarakat dalam perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan masih rendah. Hal ini menyebabkan kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan korban dan harapan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap respons pemerintah menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan pelaksanaannya di lapangan.

References

Britten, N., Campbell, R., Pope, C., Donovan, J., & Morgan, M. (2017).

Using meta ethnography to synthesise qualitative research: A worked example. *Journal of Health Services Research & Policy*, 22(1), 8-15. <https://doi.org/10.1177/1355819616642395>

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Sage handbook of qualitative research* (4th ed.). SAGE Publications.

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). SAGE Publications.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.

Runtunuwu, Y. B., & Lolong, W. R. J. (2026). The role of penitentiary officers in inmate rehabilitation. *Awang Long Law Review*, 8(3), 1946. <https://doi.org/10.56301/awl.v8i3.1946>